OMBUDSMAN KALBAR APRESIASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

Senin, 20 Maret 2023 - Fadhilah Ardi

Pontianak - Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik Ombudsman RI tak henti-hentinya mendorong terciptanya pelayanan publik berkualitas prima. Untuk itu Ombudsman memberi apresiasi terhadap upaya dan inovasi pelayanan pelayanan publik seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah menyambut baik kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sivablik) yang diselenggarakan oleh Pemprov Kalbar. Hal tersebut disampaikan Tariyah saat menjadi menjadi juri Sivablik di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin, (20/3/2023). Ia memberi apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Kalbar.

"Ombudsman Kalbar memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Harapannya agar inovasi ini mampu dan strategis memberikan sumbangsih perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Tariyah.

Sebanyak 20 top finalis dari seluruh OPD di Kalimantan Barat telah dipilih panitia untuk tampil mempresentasikan produk inovasinya. Selanjutnya dewan juri akan memilih pemenang. Selain Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, hadir sebagai dewan juri Sivablik 2023 Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Kementerian PANRB-RI, Dr. Ajib Rakhmawanto dan Akademisi Universitas Tanjungpura, Dr. Jumadi.

Selama dua hari dewan juri akan melakukan penilaian terhadap hasil karya inovasi peserta yang telah masuk ke panitia. Adapun tahapan presentasi terdiri dari pemutarn video inovasi selama 5 menit yang dilanjutkn dengan presentasi selama 8 menit dan wawancara selama 22 menit.

"Dari sisi substansi, bahwa Inovasi Pelayanan Publik wajib memenuhi beberapa hal yaitu urgensi masalah yang menjadi latar belakang, unsur kebaruan/keunikan, Implementasi dan efektifitas, dampak, potensi replikasi dan keberlanjutan inovasi," harap Tariyah. "Hal-hal ini bukan hanya dipenuhi secara administrasi semata namun juga secara substantif agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Tariyah.